



DPRD KOTA YOGYAKARTA
 SUARA WAKIL RAKYAT

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

MASA DARURAT, HAK RAKYAT JANGAN DIABAIKAN

Fokki Kejar Bukti Dugaan Pungli Sampah

YOGYA (KR) - Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD Kota Yogya Anotinus Fokki Ardiyanto kini tengah serius mengejar bukti adanya dugaan pungutan liar (pungli) di masa darurat sampah saat ini. Terutama menyangkut laporan yang diterimanya terkait oknum sopir armada truk sampah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya yang menjalankan 'bisnis' sampah.

Laporan dugaan pungli diterima Fokki ketika dirinya menggelar pertemuan dengan aktivis sampah serta perwakilan penarik gerobak pada Minggu (3/3) lalu.

"Modusnya, armada truk tidak diparkir di DLH melainkan dibawa pulang kemudian truk itu digunakan untuk berbisnis kepada masyarakat atau badan usaha. Yang mau membuang sampah, bisa ditampung di sana namun ditarik biaya Rp 100.000," tegasnya.

Pungutan yang tidak dilandasi regulasi tergolong

Antoni Fokki Ardiyanto SIP
Fraksi PDI Perjuangan

nangannya: Apalagi mereka yang diduga pungli telah menerima gaji dari negara," tegasnya.

Menurutnya, pada masa darurat sampah saat ini hak rakyat jangan sampai diabaikan. Pasalnya selama hampir satu tahun masyarakat kesulitan untuk mengelola sampah akibat pembatasan pembuangan ke depo. Di sisi lain, para penggerobak yang menggantungkan nasib pada jasa pendistribusian sampah dari wilayah ke depo kini juga semakin terhimpit atas aktivitas bisnis oknum sopir truk DLH.

"Laporan ini menjadi perhatian serius kami di tengah pembahasan perubahan perda terkait pengelolaan sampah. Bagaimana pun juga nasib para penggerobak sampah adalah tanggung jawab kami sebagai salah satu penyelenggara negara. Ingat bahwa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak adalah hak warga negara," tandasnya. **(Dhi)-d**

Fokki (dua dari kiri) mendengarkan aspirasi penggerobak sampah.

KR-Istimewa

dalam pungli. Bisnis itu bahkan merugikan penarik atau penggerobak karena pelanggannya otomatis telah direbut oleh aktivitas oknum sopir truk DLH tersebut. Sesuai ketentuan, kewenangan pemerintah ialah mendistribusikan sampah dari depo ke tempat akhir. Sedangkan pengelolaan sampah dari rumah tangga, industri atau lainnya ke depo jadi kewenangan masyarakat, sehingga jasa

penggerobak sangat dibutuhkan.

Fokki yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan saat ini tengah mengejar bukti adanya aktivitas bisnis sampah yang diduga masuk kategori pungli tersebut. Jika sudah ditemukan bukti kuat, maka akan dikaji untuk diproses ke ranah hukum. "Di tengah kesusahan rakyat kecil, masih saja ada oknum Pemkot yang menyalahgunakan kewe-

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005